

**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO SEKTOR
TRANSPORTASI, JUMLAH PENDUDUK, DAN JUMLAH KENDARAAN
BERMOTOR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI 6 (ENAM) PROVINSI PULAU SUMATERA TAHUN
2015-2020**

SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk di seminarkan.



Disusun oleh:

ARDIAN WAHYUDI

NIM: 5553160079

**KONSENTRASI EKONOMI PUBLIK
JURUSAN ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2022**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ardian Wahyudi

NIM : 5553160079

Jurusan : Ilmu Ekonomi Pembangunan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul:

“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Sektor Transportasi, Jumlah Penduduk, Dan Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di 6 (Enam) Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2015-2020” Saya tulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Skripsi yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah di tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Serang, 26 Oktober 2022



**PERSETUJUAN PENGESAHAN
PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI**

Skripsi dengan judul:
**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO SEKTOR
TRANSPORTASI, JUMLAH PENDUDUK, DAN JUMLAH KENDARAAN
BERMOTOR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI 6 (ENAM) PROVINSI PULAU SUMATERA TAHUN 2015-
2020**

Telah diuji dalam sidang skripsi yang diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu Ekonomi
Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
dan dinyatakan **LULUS**
Pada hari Jum'at, 24 Juni 2022 oleh Dewan Penguji.

Serang, 24 Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Indra Suhendra, SE., M.Si
NIP. 197702172008011016

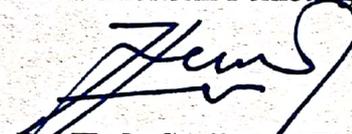

Umayatu Suiroh S, SE., M.Si
NIP. 197309242006042010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

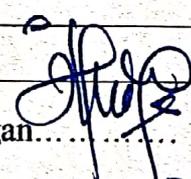
Ketua Jurusan
Ilmu Ekonomi Pembangunan


Dr.H. Akhmadi, SE.,M.M
NIP. 196511202002121002

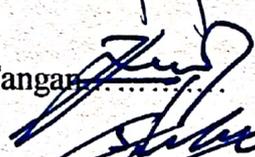

Dr. Hady Sutjipto, SE., M.Si
NIP. 197011052008121002

Dewan Penguji

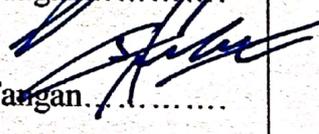
Dr. Indra Suhendra, SE., M.Si
NIP. 197702172008011016

Tanggal 26/06/22 Tanda Tangan 

Dr. Hady Sutjipto, SE., M.Si
NIP. 197011052008121002

Tanggal..... Tanda Tangan 

Sayifullah, SE., M.Akt
NIP. 198204222008121003

Tanggal 19/8/22 Tanda Tangan 

Nama	: Ardian Wahyudi
NIM	: 5553160079
Jurusan	: Ilmu Ekonomi Pembangunan
Jenjang Pendidikan	: Strata 1 (S1)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh baik secara parsial maupun simultan dari variabel Produk Domestik Regional Bruto Sektor Transportasi, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada 6 (enam) Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2015- 2020. Data yang digunakan adalah data runtun waktu dari 2015-2020, Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, variabel Produk Domestik Regional Bruto Sektor Transportasi, Jumlah Penduduk dan jumlah kendaraan bermotor mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada 6 (enam) Provinsi di Pulau Pulau Sumatera Tahun 2015- 2020.

Kata kunci : Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, PDRB Sektor Transportasi Jumlah Penduduk dan Jumlah Kendaraan Bermotor.

ABSTRACT

This study aims to determine how the influence of both the partial and simultaneous influence of the Gross Regional Domestic Product in the Transportation Sector, Population and Number of Motorized Vehicles on Motor Vehicle Tax Revenue in 6 (six) Provinces on the Island of Sumatra in 2015-2020. The data used are time series data from 2015-2020, the analytical method used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that partially, the variables of the Gross Regional Domestic Product in the Transportation Sector, Population and the number of motorized vehicles have a positive and significant influence on Motor Vehicle Tax Revenue in 6 (six) Provinces on the Island of Sumatra in 2015-2020.

Keywords: Motor Vehicle Tax Revenue, GRDP of the Transportation Sector
Number of Population and Number of Motorized Vehicles.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyang, saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kita semua, selanjutnya dengan semangat dan kerja keras saya Alhamdulillah skripsi ini dapat dibuat dengan sebaik-baiknya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tentang ” PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO SEKTOR TRANSPORTASI, JUMLAH PENDUDUK, DAN JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI 6 (ENAM) PROVINSI PULAU SUMATERA TAHUN 2015-2020”.

Dan harapan saya semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi saya dan para pembaca, untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi skripsi agar menjadi lebih baik lagi.

Terlepas dari semua itu, dalam skripsi ini sepenuhnya terdapat kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka mempersilahkan untuk memberikan segala saran dan kritik dari pembaca agar skripsi ini dapat diperbaiki dengan lebih baik lagi.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak yang telah mendoakan dan membantu dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya diberikan kepada kedua orang tua saya bapak Arbani dan ibu Robiyah yang sangat luar biasa tidak henti-hentinya mendukung, mendoakan dan membimbing saya agar menjadi anak yang berguna bagi Nusa Bangsa dan Agama. Dan tak lupa penulis menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST, MT selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Bapak Dr.H. Akhmadi, SE.,M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

3. Bapak Dr. Hady Sutjipto, SE.,M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan yang selalu sabar dan tulus membimbing.
4. Bapak Rah Adi F Ginanjar, SE., MT selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan yang selalu sabar dan tulus membimbing.
5. Bapak Dr.Indra Suhendra, SE.,M.Si selaku pembimbing utama yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, kesabaran dan ketulusannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Umayatu Suiroh S, SE.,M, Si selaku dosen pembimbing pendamping yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, kesabaran dan ketulusannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap dosen pengajar yang telah mengajarkan ilmu-ilmu kepada penulis dan para staf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah mempermudah dalam segala urusan kemahasiswaan.
8. Istri tercinta Yunia Fitri S.M yang telah berperan penting dalam penyusunan skripsi ini.
9. Serta tidak lupa dukungan dan doa dari keluarga besar yang sangat berarti dan membekas yang pada akhirnya memebrikan motivasi kepada penulis

Akhir kata saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita yang membaca skripsi ini. Semoga materi yang ada pada skripsi ini dapat dipahami dan dipelajari.

Serang, Agustus 2022

Ardian Wahyudi

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Konsep Variable Dependent.....	17
2.1.1 Pengertian Pajak.....	17
2.1.2 Manfaat dan Fungsi Pajak.....	18
2.1.3 Jenis Pajak.....	18
2.1.4 Pajak Daerah	20
2.2 Konsep variable independent	33
2.2.1 Produk Domestik Regional Bruto Sektor Transportasi.....	33
2.2.2 Jumlah Penduduk	39
2.2.3 Jumlah Kendaraan Bermotor.....	41
2.3 Kerangka pemikiran	42
2.4 Hipotesis Penelitian	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
3.1 Metode Penelitian.....	45
3.1.1 Data Penelitian	45

3.1.2	Variable penelitian dan Operasionalisasi Variabel	46
3.2	Metode Analisis.....	49
3.3	Model analisis untuk Panel Data	49
3.4	Uji normalitas.	53
3.5	Uji Asumsi Klasik	54
3.5.1	Uji Multikoleneartitas.	54
3.5.2	Uji Heteroskedastisitas.....	55
3.5.3	Uji Autokorelasi.....	56
3.6	Hipotesis Statistik.....	57
3.6.1	Uji Statistik t (Parsial).....	57
3.6.2	Uji Statistik F (Simultan)	59
3.6.3	Koefisien determinasi (R^2).....	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		62
4.1	Gambaran Umum	62
4.2	Perkembangan Variabel Penelitian	62
4.2.1	Perkembangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	62
4.2.2	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Sektor Transportasi.....	64
4.2.3	Perkembangan Jumlah Penduduk	65
4.2.4	Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor.....	66
4.3	Hasil Analisis dan Estimasi Model Data Panel	68
4.3.1	Hasil pegujian pemilihan model.....	68
4.3.2	Hasil Estimasi Model	70
4.3.3	Hasil Uji Normalitas	72
4.4	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	74
4.4.1	Hasil Uji Multikolinearitas.....	74
4.4.2	Hasil Uji Heteroskedastisitas	75
4.4.3	Hasil Uji Autokorelasi.....	76
4.5	Hasil Uji Hipotesis Statistik	77
4.5.1	Hasil Uji Statistik t (Parsial)	77
4.5.2	Hasil Uji Statistik F (Simultan).....	81

4.5.3 Hasil uji Koefisien determinasi (R^2)	83
4.6 Pembahasan	84
BAB V PENUTUP	88
5.1 Kesimpulan.....	88
5.2 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 6 (enam) Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2015-2020 (Persen)	9
Table 2. 1 Data Studi Empiris	29
Table 2. 2 Kerangka Berpikir	43
Table 3. 1 Operasionalisasi Variabel.....	48
Table 4. 1 Hasil Uji Chow.....	69
Table 4. 2 Hasil Uji Hausman	70
Table 4. 3 Hasil Estimasi Regresi Data Panel.....	71
Table 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas.....	75
Table 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	76
Table 4. 6 Hasil Uji Autokorelasi	77
Table 4. 7 Hasil Uji Statistik T.....	78
Table 4. 8 Hasil Uji Statistik F.....	82
Table 4. 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 hasil uji normalitas	74
--	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 1 Target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di 6 Provinsi Sumatera pada tahun 2015-2020 (dalam Rupiah) Sumber: Badan Pusat Statistika	7
Grafik 1 2 Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di 6 Provinsi Sumatera pada tahun 2015-2020 (dalam Rupiah) Sumber: Badan Pusat Statistika.....	8
Grafik 1 3 Grafik PDRB Sektor Transportasi pada 6 (enam) Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2015-2020	11
Grafik 1 4 Grafik Jumlah Penduduk pada 6 (enam) Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2015-2020	12
Grafik 1 5 Grafik Jumlah Kendaraan Bermotor pada 6 (enam) Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2015-2020	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu upaya pemanfaatan segala potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, karena itu pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah, dalam rangka untuk mengatur rumah tangganya sendiri demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran di daerah tersebut.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, dibutuhkan pengeluaran daerah dalam rangka membiayai pembangunan di daerah. Pengeluaran daerah ini biasa disebut juga belanja daerah. Pulau Sumatera merupakan pulau yang kaya dengan hasil bumi. Dari lima provinsi kaya di Indonesia, tiga provinsi terdapat di pulau Sumatra, yaitu provinsi Aceh, Riau dan Sumatra Selatan. Hasil-hasil utama pulau Sumatra ialah kelapa sawit, tembakau, minyak bumi, timah, bauksit, batu bara dan gas alam. Hasil-hasil bumi tersebut sebagian besar diolah oleh perusahaan-perusahaan asing. Oleh karena itu setiap Provinsi yang ada di Pulau Sumatera (dalam hal ini ada 6 Provinsi) membutuhkan pengeluaran yang besar dalam rangka membiayai pembangunan daerahnya masing-masing.

Dalam rangka membiayai pembangunan daerah, pemerintah pasti mempunyai penerimaan daerah. Begitu pula dengan Provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sumatra yang mana penerimaan daerah ini sangat penting dalam rangka membiayai pembangunan-pembangunan di daerahnya guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan,

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan suatu daerah. Penerimaan daerah atau Pendapatan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi memiliki beberapa sumber diantaranya dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat kemandirian suatu daerah otonom dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang sah yang dikelola daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Suhendi, 2007). Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini juga mempunyai beberapa sumber yaitu dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi daerah, Hasil dari perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Berikut ini adalah beberapa pengertian pajak menurut beberapa sumber. Menurut (Mardiasmo, 2018) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Menurut (Dr.

Rochmat Soemitro, 2013) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut (Dr.P.J.A. Andriani, 2014) pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Dari ketiga uraian mengenai pengertian pajak tersebut dapat dirangkum pengertiannya sebagai berikut: Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk digunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Menurut (Tony Marsyahrul, 2005) pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah Tingkat I maupun pemerintah daerah Tingkat II) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya yang digunakan untuk investasi publik. Pajak

daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah (Kaho Josef Riwu, 2002).

Dari ketiga uraian mengenai pengertian pajak daerah tersebut dapat dirangkum pengertiannya sebagai berikut: Pajak daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang terbesar, penerimaan dari pajak ini digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga mampu menarik minat investor di daerah sehingga penerimaan pajak daerah akan semakin meningkat yang selanjutnya akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang memadai sehingga hal ini akan meningkatkan belanja modal daerah.

Salah satu pajak daerah yang penerimaannya tergolong besar yaitu Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor memiliki potensi yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor sendiri adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Pajak Kendaraan Bermotor dapat menambah serta menunjang pemasukan anggaran rumah tangga daerah. Dilihat dari perkembangan teknologi dimasa sekarang ini, manusia pasti memerlukan sarana dan prasarana khususnya sarana transportasi guna mempermudah segala aktivitas sehari-harinya, sehingga kebutuhan kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya seakan kendaraan bermotor yang awalnya merupakan kebutuhan tersier mulai beranjak menjadi kebutuhan sekunder atau bahkan kebutuhan primer. Hampir setiap rumah pasti dapat kita jumpai kendaraan bermotor, baik itu kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat dan hampir semua aktivitas pekerjaan yang dilakukan tidak luput dari penggunaan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, Pajak Kendaraan Bermotor otomatis menjadi salah satu primadona dalam memberikan pemasukan dan pendapatan daerah yang cukup besar dari pada jenis-jenis pajak daerah lainnya.

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 3-8 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerapan pajak kendaraan bermotor pada suatu daerah provinsi didasarkan pada peraturan daerah provinsi yang bersangkutan yang merupakan landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor di daerah provinsi yang bersangkutan serta keputusan gubernur yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor pada provinsi dimaksud.

Dari sekian banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh suatu perekonomian, penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu permasalahan yang penting untuk ditemukan solusinya, atau diidentifikasi faktor penyebabnya. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat terjadi apabila masalah penerimaan pajak kendaraan bermotor terjadi di suatu wilayah menurut beberapa sumber.

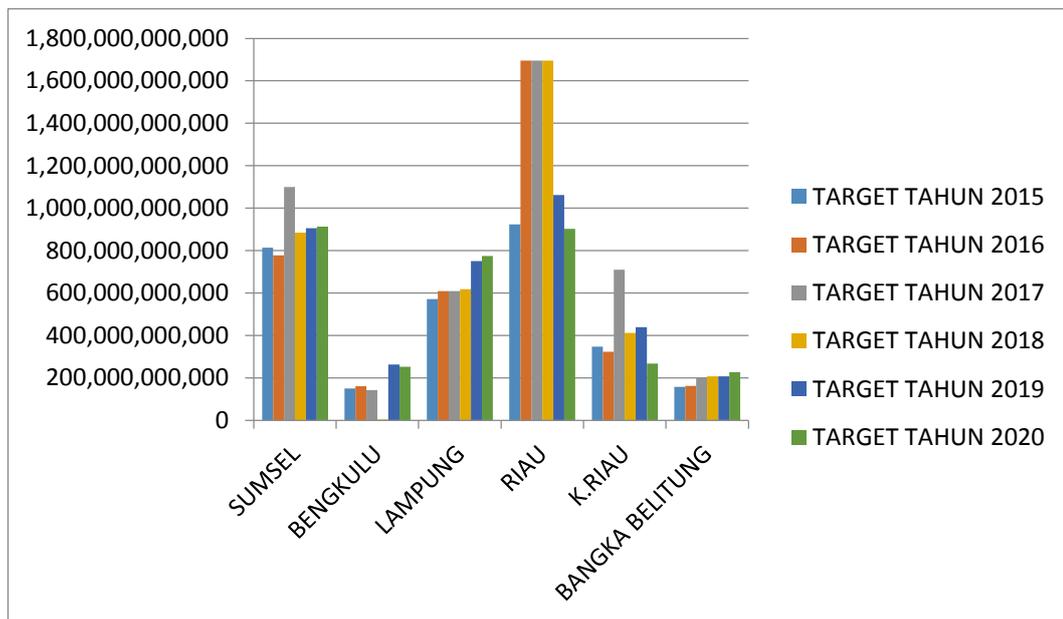
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Surya Rahayuanti, Lewi Malisan, Anisa Kusumawardani dengan judul Analisis Target dan Realisasi Pajak Daerah dengan menyimpulkan bahwa salah satu penyebab penerimaan pajak kendaraan bermotor menurun atau tidak tercapainya target penerimaan adalah keterlambatan masyarakat dalam proses pembayaran pajak. Karena tidak sedikit masyarakat yang lupa dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dibuat oleh Munawir, 2017. yang berjudul “Variabel Ekonomi Makro yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Aceh”, dengan kesimpulan jumlah penduduk, PDRB, inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Lalu penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dibuat oleh Agustina, 2020. dengan judul “Determinan Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Barat” menyimpulkan bahwa jumlah kendaraan bermotor berpengaruh dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat.

Dari beberapa uraian mengenai dampak dari penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut, dapat dirangkum bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor

akan menyebabkan atau berdampak pada Kondisi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PPKB) di 6 Provinsi Sumatera pada tahun 2015-2020 karena membutuhkan pengeluaran yang besar dalam rangka membiayai pembangunan daerahnya masing-masing yang akan ditunjukkan melalui data perkembangan target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PPKB) sebagai berikut:

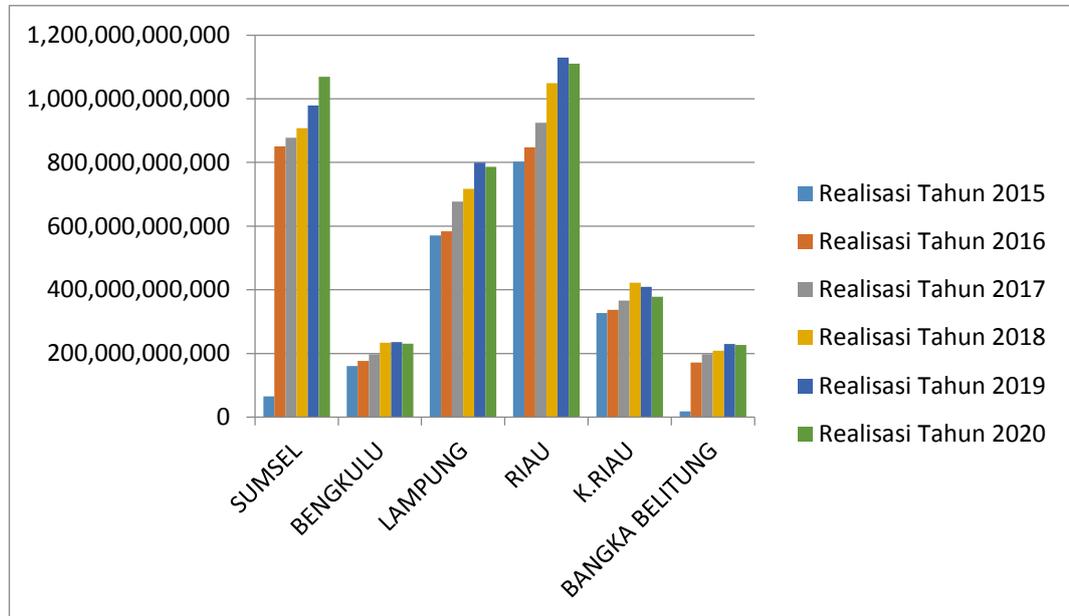


Sumber: Badan Pusat Statistika

Grafik 1.1 Target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di 6 Provinsi Sumatera pada tahun 2015-2020 (dalam Rupiah)

Dari Grafik 1.1 diatas terlihat bahwa target penerimaan pajak kendaraan bermotor menurut 6 provinsi di pulau Sumatera Tahun 2015-2020 di setiap tahun mengalami fluktuatif . Untuk Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tertinggi yaitu berada pada Provinsi Riau dengan Penerimaan diatas 1 Triliyun Rupiah setiap tahunnya, sedangkan untuk penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terendah yaitu berada pada Provinsi Bengkulu dengan penerimaan dibawah 400 Milyar Rupiah setiap Tahunnya dari tahun 2015-2020.

Berikut adalah data realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor menurut 6 provinsi di pulau Sumatera pada Tahun 2015-2020 sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistika

Grafik 1.2 Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di 6 Provinsi Sumatera pada tahun 2015-2020 (dalam Rupiah)

Dari Grafik 1.2 diatas terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor menurut 6 provinsi di pulau Sumatera tahun 2015-2020 di setiap tahun mengalami fluktuatif . Untuk Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tertinggi yaitu berada pada Provinsi Riau dengan Penerimaan diatas 1 Triliyun Rupiah setiap tahunnya, sedangkan untuk penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terendah yaitu berada pada Provinsi Bengkulu dengan penerimaan dibawah 400 Milyar Rupiah setiap Tahunnya dari tahun 2015-2020.Pemerintah telah menetapkan anggaran atau target setiap tahunnya dan pada realisasinya masih ada yang belum sesuai dengan target tersebut. hal tersebut perlu diketahui mengapa bisa terjadi.

Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu sumber penerimaan pajak Provinsi terbesar tentunya mempunyai kontribusi yang besar juga terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Berikut ini merupakan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 6 (enam) Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2015-2020.

Tabel 1. 1 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 6 (enam) Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2015-2020 (Persen)

Provinsi	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sumatera selatan	96,9%	66,6%	76,15%	74,28%	76,33%	70%
Bengkulu	64%	76%	75,38%	73,28%	71,44%	67,6%
Lampung	55,5%	75,34%	75,36%	75%	73,5%	72,32%
Riau	69,24%	72,75%	72,5%	70,9%	68,3%	67%
Kepulauan riau	78%	67,6%	66,6%	65,5%	68,5%	68,5%
Bangka belitung	96,4%	70,2%	72,2%	75,5%	72,3%	67%

Sumber: Badan Pusat Statistika

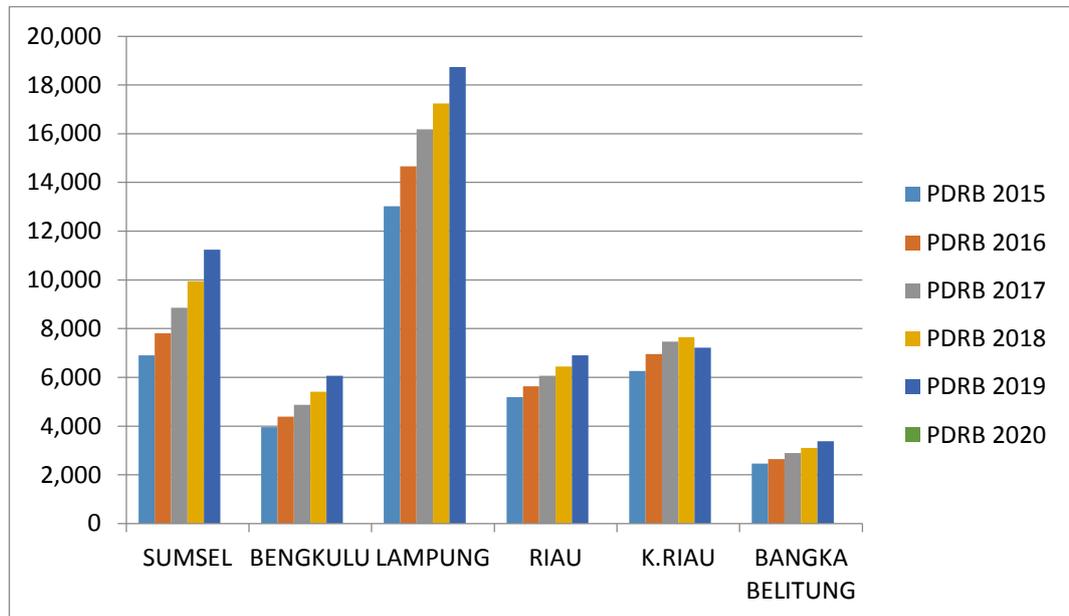
Berdasarkan data kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD pada tabel 1.1. diatas dapat dilihat bahwa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada 6 (enam) Provinsi di Pulau Sumatera mengalami fluktuasi setiap tahunnya, namun walaupun begitu Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terbesar yaitu berada pada Provinsi Sumatera Selatan dengan Kontribusi diatas 66% terhadap Pendapatan

Asli Daerah setiap tahunnya. Sedangkan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terendah yaitu berada di Provinsi Kepulauan Riau dengan kontribusi dibawah 80% terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015-2020.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah atau provinsi dalam periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas harga konstan maupun atas dasar harga berlaku. Menurut Badan Pusat Statistik produk domestik regional bruto adalah sebagai jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit usaha dalam suatu wilayah domestik. Atau merupakan jumlah hasil seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah. Jika PDRB suatu daerah meningkat maka kemampuan daerah dalam membayar pajak (ability to pay) pajak juga akan meningkat.

Dalam penyajiannya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disusun dalam dua bentuk yaitu (i) atas dasar harga konstan; yaitu PDRB yang didasarkan atas dasar harga pada tahun tertentu sebagai patokan tahun dasar dan unsur inflasi ditiadakan, dan (ii) atas dasar harga berlaku; yaitu PDRB yang didasarkan atas dasar harga pasar yang berlaku pada tahun yang bersangkutan, namun didalamnya masih ada unsur inflasinya. Produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun sedangkan produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi.

Berikut ini merupakan data dan Grafik PDRB Sektor Transportasi pada 6 (enam) Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2015-2020:



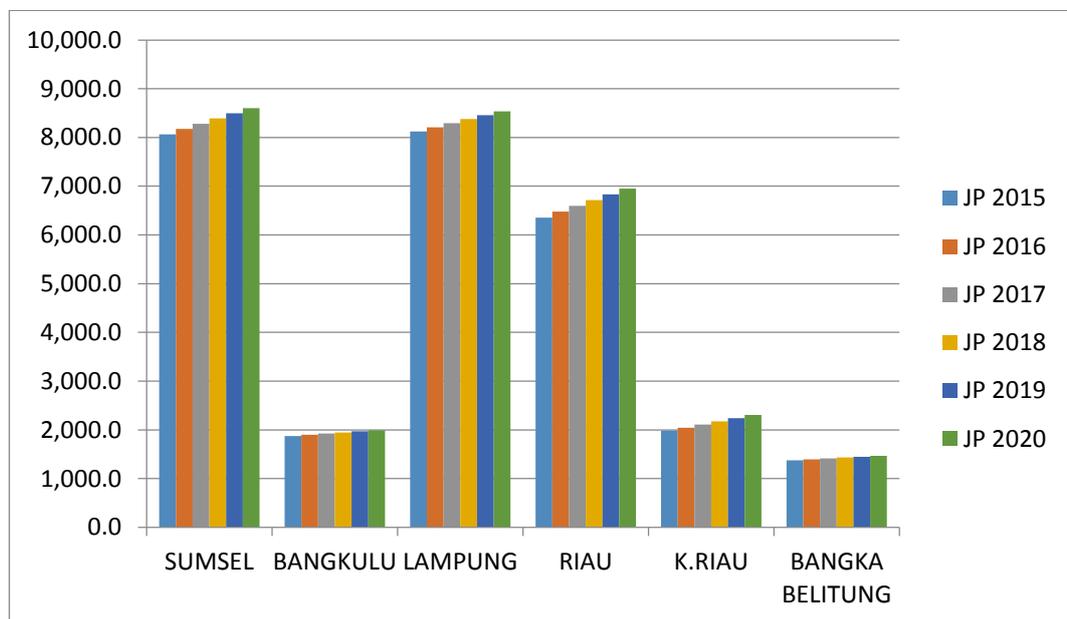
Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 1 3 Grafik PDRB Sektor Transportasi pada 6 (enam) Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2015-2020 (Triliun Rupiah)

Berdasarkan data dan grafik PDRB Sektor Transportasi diatas dapat dilihat bahwa PDRB Sektor Transportasi pada 6 (enam) Provinsi di Pulau Sumatera mengalami kenaikan setiap tahunnya dari Tahun 2015-2020. Untuk Penerimaan PDRB Sektor Transportasi tertinggi yaitu berada pada Provinsi Lampung dengan penerimaan PDRB Sektor Transportasi diatas 50 triliyun rupiah pada tahun 2020 dan diatas Rp.13 Triliyun rupiah pada tahun 2015-2020. Untuk Penerimaan PDRB Sektor Transportasi tertinggi selanjutnya yaitu berada pada Provinsi Sumsel, disusul Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, dan Provinsi Bengkulu. Provinsi Bangka Belitung sendiri menempati posisi sebagai penerima PDRB Sektor Transportasi terendah dengan penerimaan dibawah 4 triliyun rupiah pada tahun 2015-2020.

Indikator selanjutnya yang mempengaruhi penerimaan pajak Kendaraan Bermotor yaitu Jumlah Penduduk. Pengertian penduduk sendiri yaitu semua orang yang berdomisili di suatu wilayah selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan akan tetapi mempunyai tujuan untuk menetap. Jadi dengan kata lain, penduduk merupakan kumpulan manusia yang menempati wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu. Jumlah penduduk dalam setiap negara atau daerah pada setiap waktu selalu mengalami penambahan dan pengurangan. Perubahan jumlah penduduk ini dikarenakan adanya kelahiran (Fertilitas), kematian (Mortalitas), dan migrasi.

Berikut ini merupakan data dan Grafik Jumlah Penduduk pada 6 (enam) Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2015-2020:



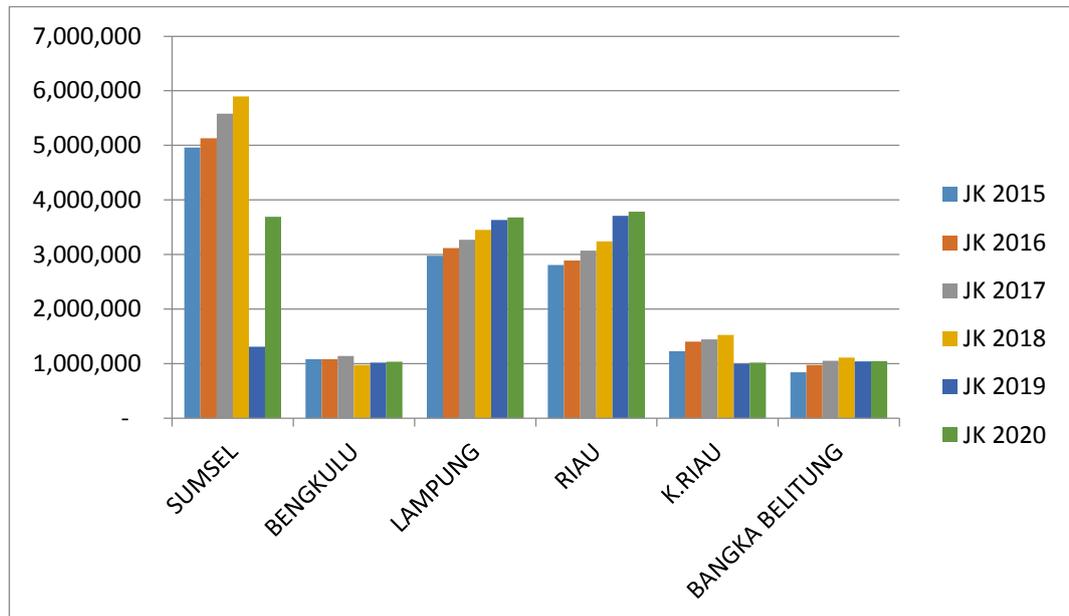
Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 1 4 Grafik Jumlah Penduduk pada 6 (enam) Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2015-2020 (Juta Jiwa)

Berdasarkan data dan grafik jumlah penduduk tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk pada 6 (enam) Provinsi di Pulau Sumatera mengalami kenaikan setiap tahunnya pada tahun 2015-2020. Provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi berada di Sumatera Selatan dengan jumlah penduduk diatas 8 juta jiwa per tahun, sedangkan Provinsi dengan jumlah penduduk terendah berada di Provinsi Bangka Belitung yang mempunyai jumlah penduduk kurang dari 1,5 juta jiwa per tahun periode tahun 2015-2020.

Salah satu faktor yang tidak dapat Dipisahkan dari pajak kendaraan bermotor adalah Jumlah Kendaraan Bermotor, pada era saat ini kendaraan bermotor seolah menjadi kebutuhan yang penting bagi masyarakat karena merupakan alat transportasi yang mempermudah segala aktivitasnya. Semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor maka meningkat pula pendapatan daerah dari sector pajak kendaraan bermotor, karena ketika masyarakat menggunakan kendaraan untuk mobilitas kehidupan sehari-hari maka secara bersamaan penerimaan pajak kendaraan bermotor akan meningkat. Miftah, 2018.

Berikut ini merupakan data dan Grafik Jumlah Kendaraan Bermotor pada 6 (enam) Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2015-2020:



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 1 5 Grafik Jumlah Kendaraan Bermotor pada 6 (enam) Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2015-2020 (Juta Unit)

Berdasarkan data dan grafik jumlah kendaraan bermotor tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor pada 6 (enam) Provinsi di Pulau Sumatera mengalami Fluktuatif setiap tahunnya periode tahun 2015-2020. Provinsi dengan jumlah kendaraan bermotor tertinggi berada di Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah kendaraan bermotor diatas 4 juta unit setiap tahunnya, sedangkan Provinsi dengan jumlah kendaraan bermotor terendah berada di Provinsi Bangka belitung dengan jumlah kendaraan bermotor kurang dari 1,2 juta unit pada tahun 2015-2020.

Masalah Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka peneliti menentukan judul penelitian sebagai berikut “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Sektor Transportasi, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kendaraan

Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PPKB) Di 6 Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2015-2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti menentukan kalimat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Sektor Transportasi, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kendaraan Bermotor secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PPKB) di 6 Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2015-2020?
2. Bagaimana Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Sektor Transportasi, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kendaraan Bermotor secara simultan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PPKB) di 6 Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2015-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Sektor Transportasi, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kendaraan Bermotor secara parsial Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PPKB) di 6 Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2015-2020.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Sektor Transportasi, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kendaraan Bermotor secara simultan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PPKB) di 6 Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2015-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat secara keilmuan dan manfaat secara praktis. Berikut ini adalah manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Keilmuan
 - a. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PPKB) di 6 provinsi pulau Sumatera tahun 2015-2020 dan riset ini diharapkan mampu sebagai tambahan informasi baru bagi masyarakat dan mahasiswa/i yang ingin melakukan penelitian.
 - b. Sebagai bahan studi bagi mahasiswa/i fakultas ekonomi dan bisnis khusus nya bagi departemen ekonomi pembangunan ingin melakukan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat tentang Produk Domestik Regional Bruto Sektor Transportasi, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di 6 Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2015-2020.
 - b. Penelitian ini juga di ambil sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam membuat dan pengambilan kebijakan khususnya kebijakan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah agar lebih optimal dalam mendorong pemerataan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Indonesia pada umumnya dan pada tingkat provinsi di pulau Sumatera khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, 2014. *"Teori Perpajakan"* Jakarta, Salemba Empat
- Badan Pusat Statistik. 2012. *"Produk Domestik Regional Bruto dalam Angka."* BPS Jawa Tengah
- Apriliyanti, D. A. K. and Harianto Hakim, D. B. (2021) '*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Institut Pertanian Bogor , Jawa Barat , Indonesia*', E-Jurnal Manajemen, 10(4), pp. 375–394.
- Ayu Triani Utami (2014) '*Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah*', Pajak Daerah.
- Carlyn, G. et al. (2020) '*Sebelum Dan Sesudah Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Online Berbasis E-Samsat Di Provinsi Sulawesi Utara*', Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 20(02), pp. 130–141.
- Dr. Rochmat Soemitro (2013) '*Perpajakan Edisi Revisi 2013*', P. 01.
- Dr.P.J.A. Andriani (2014) '*Perpajakan Indonesia*', P. 3.
- Ertadha Bill Qisthi Faaz, Kurnia Heriansyah, A. D. (2020) '*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Dki Jakarta*',
- E-Jurnal :[Http://Journal.Univpancasila.Ac.Id/Index.Php/RELEVAN](http://Journal.Univpancasila.Ac.Id/Index.Php/RELEVAN), 1(November), Pp. 24–34.
- Ferdian, T. (2019) '*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat ...*', Jurnal Akrab Juara.
- Ghozali, I. (2017) *Model Persamaan Struktural Konsep Dan Aplikasi Program AMOS 24*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. (2004) *Basic Econometrics (Ekonometrika Dasar)*. Edited by Erlangga. Jakarta.
- Gujarati, D. N. (2012) *Dasar-dasar Ekonometrika*,.

Kaho Josef Riwu (2002) '*Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia.*'

Lia Kartika, Abd. Rahim, S. A. (2018) '*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan*', pp. 1–7.

LUKMAN, J. F. A. (2015) '*Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pajak kendaraan bermotor di kabupaten pangkep*'.

Mardiasmo (2018) *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Andi.

Munawir, 2017 (2017) '*Variabel ekonomi makro yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di aceh*', 4(November), pp. 101–117.

Nita Darmasari (2005) '*Pembangunan Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi*', Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 3 No., pp. 101–112.

Nyoman, N., Ariasih, P. and Utama, I. M. S. (2011) '*Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pdrb Per Kapita Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bali*', pp. 543–562.

Oktavia, E., Safri, M. and Vyn Amzar, Y. (2019) '*Faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Tanjung Jabung Barat (studi kasus: Kecamatan Tungkal Ilir)*', e-Journal Perdagangan Industri dan Moneter, 7(2), pp. 73–82. doi: 10.22437/pim.v7i2.13098.

Ratnasari, 2016 (2016) '*Analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor di provinsi sulawesi tenggara*', 1, pp. 82–95.

Resseffendi (2010) '*Metode Penelitian.*', NASPA Journal, p. 33.

Saputra, M. (2018) '*Pengaruh Jumlah dan Mutasi Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Yogyakarta*', Journal of Chemical Information and Modeling, 01(01), pp. 1689–1699.

Sartika, E. D., Afifah, N. and Sari, S. N. (2021) '*Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid 19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Sulawesi Selatan*', Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, 5(2), pp. 144–159. doi: 10.25139/jaap.v5i2.4144.

Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung.

Thomas Nadeak and Eva Sunasti (2019) '*Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973 /154 2018*', Buana Ilmu. Doi: 10.36805/Bi.V4i1.809.

Tony Marsyahrul (2005) '*Pengantar Perpajakan / Tony Marsyahrul; Editor, JB. Sudar Manto*', P. 5.

Yunimiartiningsih, E. (2017) '*Pengaruh Jumlah Hotel, Jumlah Wisatawan, Pendapatan Perkapita Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Jawa Timur Tahun 2012-2016*', Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, pp. 1–21.

Yuskar and Yanti, F. (2014) '*Analisis Efektivitas dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Barat*', Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis